

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Di era otonomi saat ini pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten/kota sebagai daerah otonom dengan tingkat dinamika yang bervariasi telah banyak memperlihatkan keberhasilan baik dari segi sarana dan prasarana dibidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Namun dibalik keberhasilan tersebut kita juga menghadapi dan merasakan masalah dan tantangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang lebih demokratis melalui tuntutan reformasi disegala bidang kehidupan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Hal ini menuntut pemerintah daerah mempersiapkan segala sesuatunya dalam upaya mendukung otonomi daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satu aspek penting yang mempengaruhi kelancaran pembangunan dan pelayanan publik adalah proses pencairan anggaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) sebagai bentuk perintah kepada Bank Operasional Kas Daerah untuk mencairkan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui. Efektivitas penerbitan SP2D sangat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah serta pengelolaan asset daerah secara optimal.

Namun, seringkali terjadi permasalahan dalam proses penerbitan SP2D, seperti keterlambatan, ketidaksesuaian data, hingga masalah administrasi lainnya yang dapat berdampak pada kelancaran pencairan dana dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerbitan SP2D di BPKAD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas penerbitan SP2D pada BPKAD serta mengidentifikasi hambatan yang ada dalam proses penerbitan SP2D tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “ANALISIS EFEKTIVITAS PENERBITAN SP2D PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH” sebagai judul dalam tugas akhir. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.



1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Penerbitan SP2D Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Penerbitan SP2D Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang ?
3. Apa Upaya untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam Penerbitan SP2D Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui Efektifitas Penerbitan SP2D Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Penerbitan SP2D Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan mengatasi kendala yang ditemui dalam Penerbitan SP2D Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diperoleh dalam penulisan ini, yaitu:

1.1.1 Manfaat bagi pihak lain.

- a. Sebagai media bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas Penerbitan SP2D pada BPKAD
- b. Sebagai referensi dalam pembuatan tugas akhir selanjutnya.

1.1.2 Manfaat bagi instansi.

- a. Sebagai bahan acuan bagi instansi dalam mengevaluasi kebijakan dalam penerbitan SP2D pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Untuk menjalin hubungan baik antar Universitas Andalas dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.1.3 Manfaat bagi penulis.

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Andalas.
- b. Dapat mengimplementasikan ilmu yang dipelajari selama dibangku kuliah.
- c. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama magang ke dalam dunia kerja setelah lulus dari Universitas Andalas.

1.2 Tempat dan waktu penulisan.

Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang yang berlokasi di Jl. Prof. Yamin SH No. 70, Kp. Jao, Kec. Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat selama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2024.

1.3 Metode Penelitian.

Untuk memperoleh data yang relevan serta dapat diuji kebenarannya, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan.

Penulis mengumpulkan informasi dari sumber artikel, buku, laporan-laporan dan sumber lain yang terkait bahan dan teori untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji.

2. Penelitian Lapangan.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan langsung dari perusahaan, penulis juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengamatan pada kegiatan operasional perusahaan.
- b. Wawancara dengan karyawan perusahaan.
- c. Pengamatan data dari perusahaan.

1.4 Sistematika penulisan.

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri atas :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menjelaskan landasan teori yang diperlukan dalam menunjang konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan penelitian. Pada bab ini dibahas tentang pajak, pajak daerah, efektifitas pajak daerah, serta efektifitas pemungutan pajak reklame.

BAB III: GAMBARAN UMUM INSTANSI.

Bab ini berisi tentang instansi yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, logo dan struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

BAB IV: PEMBAHASAN.

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan hasil studi lapangan penulis mengenai Analisis efektivitas pemungutan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

BAB V: PENUTUPAN.

Bab ini merupakan bagian hasil akhir dari seluruh pembahasan dan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan serta bab ini juga berisikan saran yang relevan mengenai hasil studi lapangan yang dilakukan